

LAPORAN LINTAS KASUS

Klaster 1: Lelilef Waibulan dan Lelilef Sawai

Klaster 2: Sawai Itepo dan Kobe

Klaster 3: Fidi Jaya

Oktober 2026

Disusun oleh Tim Delegasi Peneliti Kab. Halmahera Tengah,
Provinsi Maluku Utara, Dala Institute dan eLSiL Kie Raha.

KONTRIBUTOR

Tim Penyusun

Aliyah A.D.C Bhuana

Azka Azifa

VISUAL

Astari Parapat

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan oleh gabungan peneliti dari perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Dala Institute, dan eLSiL Kie Raha pada November 2025

Daftar Isi



04

Pendahuluan

05

Metodologi

07

Karakteristik dan Konteks
Tiga Klaster

08

Pembahasan Lintas
Kasus

16

Penutup

1. Pendahuluan

Laporan ini merupakan sintesis lintas kasus dari tiga studi kasus yang dihasilkan melalui Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) di wilayah terdampak industri nikel Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara:

- **Klaster 1:** Desa Lelilef Waibulan dan Lelilef Sawai (Ring 1, dampak tinggi, berdekatan langsung dengan kawasan industri ekstraktif)
- **Klaster 2:** Desa Kobe dan Sawai Itepo (Ring 2, dampak tidak langsung, terletak di jalur penghubung Weda–Weda Tengah)
- **Klaster 3:** Desa Fidi Jaya (Ring 2, pusat administratif dan ekonomi Kecamatan Weda, ±25–30 km dari pusat tambang)

Ketiga studi menggunakan kerangka analisis yang sama, yaitu empat pertanyaan penelitian utama yang dibaca melalui empat dimensi kerangka transisi berkeadilan (just transition framework): **keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan rekognisi, dan keadilan restoratif**. Kesamaan kerangka ini memungkinkan perbandingan yang sistematis lintas kasus.

Laporan ini disusun per pertanyaan penelitian (research question/RQ), agar setiap pertanyaan penelitian dapat dibahas secara utuh dan runtut. Untuk setiap RQ, tiga pertanyaan sintesis berikut dijawab secara berurutan:

- Di mana **kesamaan yang mencolok dan perbedaan mendasar** antar tiga klaster, dan mengapa perbedaan itu bisa terjadi?
- Apa **tantangan dan pembelajaran** lintas kasus yang muncul dari RQ tersebut?
- Apa **isu prioritas yang muncul**, baik yang bersifat lintas klaster (cross-cutting) maupun yang spesifik untuk satu klaster tertentu?

Selain temuan lapangan tiga klaster, **laporan ini juga mengacu pada tiga sumber pemerintah untuk menguji dan memperkaya temuan warga dan sebagai sumber trigulasi tambahan**. Tiga sumber pemerintah tersebut, yakni 1) **refleksi kepala dinas** yang merupakan catatan diskusi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada saat kegiatan diseminasi hasil penelitian setiap klaster, 2) **Cetak Biru (Blue Print) PPM Provinsi Maluku Utara 2025–2030** yang merupakan dokumen resmi Dinas ESDM Provinsi yang menjadi rujukan wajib penyusunan Rencana Induk PPM bagi seluruh perusahaan pemegang IUP di provinsi ini, dan 3) **RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah 2025–2029**, yakni dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan rencana pembangunan daerah dan sektor.

2. Metodologi

Kerangka analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan **studi kasus jamak kualitatif** untuk menyelidiki dampak sosial ekonomi penambangan dan pengolahan nikel di tiga desa terpilih.

Studi kasus jamak memungkinkan:

- **Perbandingan lintas kasus** untuk mengidentifikasi tema yang berulang atau pengalaman yang berbeda.
- **Kedalaman kontekstual** dalam menganalisis bagaimana faktor lokal (misalnya, tata kelola, geografi, praktik perusahaan pertambangan) membentuk hasil.

Dengan berfokus pada eksplorasi mendalam metode ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana aktivitas penambangan bersinggungan dengan akses masyarakat terhadap layanan dasar, efektivitas program Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), kesiapan lokal untuk masa depan pasca-tambang, dan implikasi kebijakan di tingkat regional.

Pengumpulan data

Wawancara



Mengumpulkan wawasan semi terstruktur dari para pemangku kepentingan utama mencakup representasi gender, usia, status disabilitas, latar belakang mata pencarian, dan pelaku kelembagaan.

Diskusi Kelompok Terarah



Untuk mendorong dialog terbuka tentang berbagai masalah, aspirasi, dan kebutuhan kolektif, setidaknya 2 FGD (campuran, perempuan, dan pemuda) diselenggarakan di setiap desa.

Observasi lapangan



Menangkap kondisi, aktivitas, dan dinamika sosial secara langsung, observasi dilakukan di setiap desa dengan mengamati lingkungan, aktivitas masyarakat, serta interaksi dan penggunaan ruang yang relevan dengan isu penelitian.

Jumlah dan Komposisi Responden



Wawancara

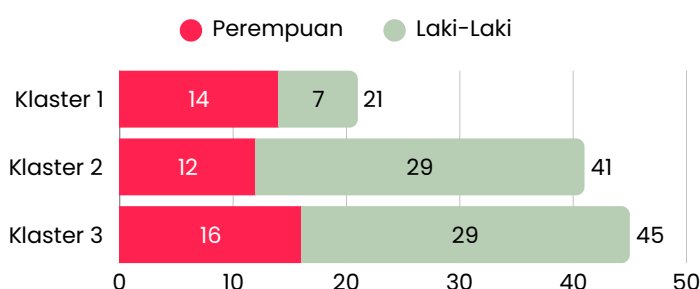
107 responden



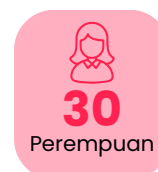
Diskusi Kelompok Terarah

79 peserta

Komposisi responden berdasarkan klaster dan gender



Komposisi Peserta FGD berdasarkan kelompok



Lokasi Tiga Studi Kasus



3. Karakteristik dan Konteks Tiga Klaster

Ketiga klaster ini memiliki tiga kondisi berbeda dalam gradien keterpaparan terhadap industri nikel. Perbedaan konteks ini menjadi kunci untuk memahami mengapa pola-pola yang tampak serupa di permukaan sebenarnya bekerja melalui mekanisme yang berbeda pada tiap RQ.

Table 1: Perbandingan karakteristik ketiga klaster studi kasus

Aspek	Klaster 1 (Lelilef W. & Sawai)	Klaster 2 (Kobe & Sawai Itepo)	Klaster 3 (Fidi Jaya)
Posisi ring tambang	Ring 1 — berbatasan langsung dengan kawasan industri IWIP	Ring 2 — ±20–23 km dari IWIP, jalur lintas pekerja	Ring 2/3 — ±25–30 km, lokasi ibu kota kabupaten
Karakter utama desa	Kawasan penyangga industri, padat pekerja & pendatang	Desa transisi, agraris-pesisir dengan tekanan tambang tidak langsung	Kota kecil administratif & pusat perdagangan/pelabuhan
Pertumbuhan penduduk 2017–2024	~6 kali lipat (masing-masing >7.000 jiwa)	62–85% (jauh lebih moderat)	~5 kali lipat (3.715 → 17.052 jiwa)
Rasio jenis kelamin 2024	284 (dominasi laki-laki ekstrem)	146 (meningkat, moderat)	310 (paling ekstrem dari 3 klaster)
Mekanisme utama perubahan ekonomi	Alih fungsi usaha ke sektor jasa penunjang tambang (kos-kosan, transportasi)	Penjualan lahan sebagai sumber likuiditas utama	Efek turunan (<i>indirect employment multiplier</i>) via perdagangan & pelabuhan
Preseden regional yang dirujuk warga	Tidak eksplisit disebut	Pulau Gebe — dirujuk namun lebih abstrak	Pulau Gebe — dirujuk sangat konkret dan berulang, termasuk artikel media
Isu layanan dasar paling menonjol	Air bersih, debu	Air bersih (masalah struktural sejak sebelum tambang)	Drainase & genangan (akibat konversi rawa jadi permukiman), air bersih
Isu sosial khas	Erosi gotong royong, kriminalitas, konflik alkohol	Fragmentasi kelembagaan (Karang Taruna “mati”)	Kriminalitas kota (PSK, HIV/AIDS, lokalisasi, jambret), erosi gotong royong

4. Pembahasan Lintas Kasus

4.1 Topik 1: Perubahan Sosial-Ekonomi dari Pra-Tambang hingga Kini

Apa saja bentuk permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak tambang, dan bagaimana perubahan ini terjadi dari sebelum tambang beroperasi hingga saat ini?

4.1.1 Kesamaan dan Perbedaan Antar Studi Kasus

Ketiga klaster menunjukkan pola yang secara struktural identik: **ekspansi tambang memicu lonjakan ekonomi yang cepat namun terkonsentrasi, disertai erosi penghidupan tradisional** (pertanian, perkebunan, perikanan). Di ketiganya, kelompok yang memiliki modal, aset, keterampilan atau usia produktif baik pendatang maupun lokal memperoleh manfaat lebih cepat dan lebih besar (keadilan distributif), sementara kelompok, seperti pemuda tanpa keterampilan, nelayan, petani tanpa lahan, dan lansia menanggung beban lingkungan dan ekonomi yang tidak proporsional. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak dibarengi kenaikan pendapatan yang setara juga muncul konsisten di ketiga studi kasus.

Kesamaan pola distributif ini dihasilkan oleh mekanisme transformasi ekonomi yang justru berbeda di tiap klaster. Di klaster 1, transformasi terjadi melalui alih fungsi usaha (dari nelayan/petani menjadi pemilik kos-kosan/kios) mengingat alih fungsi lahan sudah terjadi jauh lebih awal dibandingkan kedua klaster lainnya. Alih fungsi usaha yang masih terus terjadi saat ini didorong tekanan langsung kepadatan pekerja Ring 1. Namun di klaster 2, perubahan fungsi lahan masih terjadi dan merupakan dampak dari penjualan lahan menjadi likuiditas instan. Mekanisme ini bersifat lebih permanen dan sulit dibalik, dan menjadi dasar konsep *economic lock-in* yang menonjol di klaster ini (begitu lahan terjual, tidak ada basis untuk kembali ke ekonomi lama).

Di klaster 3, lonjakan ekonomi ini merupakan efek turunan tidak langsung (*indirect employment multiplier*), Fidi Jaya diuntungkan bukan karena kedekatan fisik dengan tambang, melainkan karena fungsinya sebagai simpul perdagangan dan pusat administratif yang menampung arus uang dari pekerja tambang yang lewat atau berdomisili di sana.

Perbedaan mekanisme ini berimplikasi pada dua hal lain yang juga berbeda antar klaster: karakter dinamika sosial dan fase boom-bust. Klaster 1 dan 2 mengalami tekanan sosial khas kawasan tambang (konflik antarsuku, konsumsi alkohol saat gajian, kriminalitas), sedangkan Klaster 3 sebagai kota kecil semi-perkotaan, memunculkan fenomena sosial khas urban yang secara eksplisit dibicarakan dalam wawancara yakni: prostitusi, kasus HIV/AIDS yang disebut oleh beberapa tenaga kesehatan, jambret, dan permintaan pos kamling dari aparat keamanan. Ini menunjukkan bahwa jarak dari pusat tambang tidak berbanding lurus dengan tingkat risiko sosial. Dari sisi boom-bust, Klaster 1 telah mengalami gejala *bust* (pascatambang kecil) dalam bentuk penurunan okupansi kos-kosan akibat pembangunan mess pekerja perusahaan; Klaster 3 mengalami pergeseran pusat ekonomi ke Lelilef yang membuat sebagian usaha “sepi” (disebut turun hingga $\frac{1}{4}$); Klaster 2 belum menunjukkan gejala penurunan yang setara karena skala ekonominya memang tidak pernah mencapai puncak setinggi dua klaster lain, namun risikonya justru lebih struktural karena lock-in aset lahan sudah terjadi.



Pola distributif yang timpang di atas sejalan dengan data resmi tingkat kabupaten/provinsi. Cetak Biru PPM Provinsi Maluku Utara 2025–2030 menggunakan istilah “pertumbuhan tanpa pemerataan”: Kabupaten Halmahera Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi 60,77% pada 2025, tertinggi secara nasional yang didorong dominan oleh sektor nikel dan industri pengolahan, namun persentase penduduk miskin dan ketimpangan yang masih tinggi. Dokumen ini menyimpulkan bahwa manfaat ekonomi dominan dari pertambangan “lebih berpihak pada investasi industri besar dan bukan langsung pada produksi lokal skala kecil atau distribusi pendapatan yang luas”. RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah 2025–2029 memberi validasi yang lebih tajam lagi melalui data PDRB per sektor 2020–2024: sektor Pertambangan dan Penggalian naik 18 kali lipat (Rp540 miliar → Rp9.772 miliar) dan sektor Industri Pengolahan naik 23 kali lipat (Rp842 miliar → Rp19.425 miliar), sementara sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan basis penghidupan mayoritas warga ketiga klaster, hanya naik ~22% (Rp545 miliar → Rp668 miliar) pada periode yang sama. RPJMD menyebut kondisi ini sebagai **“paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial”**.

Selain pola distribusi manfaat yang timpang, erosi kelembagaan sosial desa merupakan “korban tak terlihat” dari ekspansi tambang yang jarang masuk dalam agenda kebijakan formal. Dalam setiap studi kasus mengidentifikasi menurunnya partisipasi dan interaksi sosial masyarakat akibat kesibukan sektor industri sebagai masalah utama. Akan tetapi, masuknya nilai fagogoru dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah 2025–2029, yakni menjadikan “Transformasi Nilai Fagogoru” sebagai visi utama pembangunan daerah, menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan sosial berbasis nilai lokal bukan sekadar usulan teknokratis, melainkan sejalan dengan visi resmi kepala daerah terpilih.

4.1.2 Tantangan dan Pembelajaran Lintas Kasus

Berdasarkan dari penjelasan mengenai kesamaan yang muncul di ketiga klaster, namun dengan mekanisme transformasi yang berbeda-beda, memunculkan tantangan bersama dalam perubahan sosial-ekonomi, yakni

- **Pola keadilan distributif yang timpang berulang identik di ketiga klaster,** manfaat ekonomi mengalir ke kelompok yang sudah punya modal/aset dan keterampilan sebelum tambang hadir, bukan hasil kebijakan afirmatif yang disengaja.
- **Tiga mekanisme kehilangan penghidupan** (alih fungsi usaha, penjualan lahan, efek turunan) sama-sama tidak memiliki jalur formal untuk dipulihkan atau dikompensasi, warga menanggung sendiri risiko transisi ekonomi tanpa jaring pengaman.
- **Erosi kohesi sosial** (kepedulian, gotong royong, kelembagaan pemuda) terjadi di ketiganya meski dipicu oleh jalur yang berbeda-beda (kesibukan kerja, migrasi, individuasi ekonomi) menunjukkan bahwa modal sosial adalah “korban tak terlihat” yang konsisten dari ekspansi tambang manapun bentuknya.

Tantangan di atas menunjukkan satu pembelajaran mendasar untuk memahami **konteks spesifik dan sinyal dini adalah kunci keberhasilan intervensi ke depan.**

- Karena mekanisme kehilangan aset berbeda secara mendasar, strategi diversifikasi ekonomi tidak bisa didekati secara seragam lintas klaster.
- Gejala boom-bust yang sudah mulai terlihat di Klaster 1 dan 3 (meski tambang masih beroperasi) menunjukkan pentingnya deteksi dini.
- Fenomena sosial khas urban yang terjadi juga di Klaster 3 adalah pengingat bahwa profil risiko sosial tidak bisa diasumsikan terjadi hanya pada lingkaran terdekat.



4.2 Topik 2: Ketersediaan dan Kesenjangan Akses Layanan Dasar

Bagaimana kondisi terkini dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar di wilayah terdampak tambang, serta bagaimana proyeksi kebutuhannya untuk mengatasi kesenjangan tersebut?

4.2.1 Kesamaan dan Perbedaan Antar Studi Kasus

Pola paling konsisten di ketiga klaster adalah: **kebutuhan layanan dasar tumbuh lebih cepat daripada kapasitas penyediaannya** (dengan berbagai sebutan konseptual, seperti *lagging infrastructure*, *infrastructure deficit trap*, *access-quality gap*, *access paradox*). Air bersih konsisten menjadi isu paling dominan di ketiga lokasi studi kasus. Kesehatan dan pendidikan gratis diakui luas sebagai perbaikan nyata, namun ketiganya juga menunjukkan tantangan yang sama: kekurangan tenaga (medis dan pendidik), dan fasilitas fisik yang bertambah lebih cepat daripada kapasitas operasionalnya.

Di balik kesamaan “air bersih sebagai isu utama”, akar penyebabnya berbeda secara fundamental:

- **Klaster 1:** krisis air adalah **dampak baru yang muncul bersamaan dengan tambang** (kontaminasi, peningkatan permintaan), infrastruktur fisik sebetulnya sudah dibangun, namun distribusinya ke rumah tangga yang menjadi kendala.



- **Klaster 2:** krisis air adalah **masalah struktural lama yang sudah ada sejak sebelum tambang beroperasi** (dikonfirmasi sejak 2013) dan hanya diperparah oleh lonjakan penduduk, solusinya membutuhkan pendekatan hidrogeologis, bukan sekadar perbaikan distribusi pipa.
- **Klaster 3:** krisis air bersifat **spasial-teknis**, muncul spesifik di kawasan yang dibangun di atas bekas rawa (kehilangan fungsi filtrasi alami), sementara kawasan “tanah lama” dengan sumur relatif tidak bermasalah, kesenjangan terjadi dalam satu desa, bukan hanya antar desa.

Kesenjangan SDM layanan kesehatan dan pendidikan dibandingkan pertumbuhan fasilitas fisik dikaitkan dengan fenomena “beban ganda” (*double burden disease*). Dalam konteks kesehatan, penyakit menular yang semestinya menurun seiring membaiknya layanan justru tidak menurun di Halmahera Tengah, serta kebutuhan mendesak peningkatan status Pustu di wilayah seperti Kobe menjadi setara Puskesmas akibat kekurangan tenaga kesehatan. Berdasarkan penuturan Kadis Dinas Kesehatan Halmahera Tengah, Dinas Kesehatan hanya mampu menyelesaikan sekitar 30% dari masalah kesehatan yang bersifat sensitif, sisanya membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, **proyeksi kebutuhan layanan dasar yang belum berbasis proyeksi pertumbuhan penduduk riil.** Peningkatan layanan dasar saat ini bergantung pada infrastruktur yang sebenarnya dibangun untuk kepentingan lain, seperti jalan nasional, proyek pemerintah pusat, yang kebetulan bersamaan dengan periode industrialisasi.

Perbedaan lain yang relevan: **konflik lahan sebagai ancaman layanan dasar hanya muncul menonjol di Klaster 2** (klaim tanah berulang atas lahan sekolah karena status tanah informal). Skala tekanan permukiman berbeda menurut kepadatan: paling ekstrem di Klaster 1 (kepadatan naik >50%), berbeda bentuk di Klaster 3 (konversi rawa menjadi permukiman), dan paling ringan di Klaster 2.

4.2.2 Tantangan dan Pembelajaran Lintas Kasus

Berdasarkan dari penjelasan mengenai kesamaan yang muncul di ketiga klaster, namun dengan akar penyebab yang berbeda secara fundamental, memunculkan tantangan bersama dalam kondisi dan kesenjangan layanan dasar, yakni

- **Kesenjangan struktural antara pembangunan fisik** (cepat, terukur, mudah dilaporkan) dan pembangunan kapasitas SDM layanan (lambat, sulit diukur), konsisten di ketiga klaster.
- **Rencana pembangunan fasilitas besar** (kawasan pendidikan terpadu, RS, kawasan dagang) **sudah mulai dibahas oleh pemda/perusahaan namun belum tersosialisasi ke masyarakat.**
- Karena akar penyebab krisis air berbeda-beda, **solusi yang diterapkan secara seragam berisiko tidak menyelesaikan akar masalah** di masing-masing klaster.
- **Tantangan tata kelola tambahan:** Kadis DLH turut menyampaikan bahwa revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sedang disiapkan pemda berpotensi memicu “konflik sosial luar biasa” yang menunjukkan bahwa upaya formal mengatasi krisis lahan/ruang justru berisiko menciptakan konflik baru jika tidak dikelola partisipatif.

Ketiga poin di atas mengarah pada satu pembelajaran yang sama: **penyelesaian kesenjangan layanan dasar membutuhkan diagnosis akar masalah yang tepat sasaran** dan perencanaan yang antisipatif ke depan, bukan sekadar respons reaktif terhadap kondisi yang tampak di permukaan saat ini.

- **Diperlukan kajian teknis spesifik** lokasi sebelum solusi diterapkan: kajian hidrogeologis untuk Klaster 2, kajian drainase/tata ruang untuk Klaster 3, percepatan distribusi untuk Klaster 1.
- **Proyeksi kebutuhan layanan dasar harus didasarkan pada proyeksi pertumbuhan penduduk 5–10 tahun ke depan**, bukan kondisi populasi saat ini.
- **Krisis di dalam satu desa (pola spasial Klaster 3) mengingatkan bahwa pemetaan kesenjangan tidak boleh berhenti di level desa**, tetapi perlu turun ke level dusun/kawasan.

Yang menjadi catatan sepanjang proses penelitian ini bagaimana **penyediaan layanan dasar meskipun bersifat sektoral, namun perencanaan membutuhkan pendekatan lintas sektor** untuk mengidentifikasi tantangan, kebutuhan, dan penyelesaian secara komprehensif dan berkelanjutan.



4.3 Topik 3: Efektivitas Program PPM/CSR

Sejauh mana efektivitas program PPM dalam memperkuat layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana mekanisme evaluasinya selama ini?

3.3.1 Kesamaan dan Perbedaan Antar Studi Kasus

Ketiga klaster menunjukkan (1) **ketimpangan informasi**: CSR/PPM dikenal luas oleh aktor formal desa namun nyaris tidak dikenal warga biasa (IRT, lansia, nelayan); (2) **pergeseran dari model proaktif/terstruktur ke model berbasis proposal yang reaktif** setelah IWIP menjadi operator utama; (3) **peran sentral dan sekaligus titik lemah**, pemerintah desa sebagai satu-satunya perantara CSR/PPM, tanpa mekanisme evaluasi atau pengaduan yang dikenali masyarakat; dan (4) **bantuan yang bersifat karitatif-konsumtif** dibandingkan investasi pemberdayaan jangka panjang.

Meski pola dasarnya sama, penekanan masing-masing klaster berbeda karena sejarah dan posisi struktural yang berbeda:

- Klaster 2 memiliki **narasi paling detail mengenai perbandingan eksplisit dengan era perusahaan sebelumnya**: era WBN/Tekindo memiliki lembaga penengah formal (Yayasan Saloi), program agribisnis dengan pendampingan, dan bus sekolah, semuanya terhenti setelah transisi ke IWIP tanpa mekanisme transisi.
- Klaster 3 **paling menonjolkan ketimpangan geografis antar-ring dan satu-satunya yang mengangkat kekaburan identitas CSR vs PPM** (kewajiban hukum vs sukarela) sebagai persoalan tersendiri, warga tidak tahu ada kewajiban PPM sehingga tidak punya dasar menuntut (accountability gap).

- Klaster 1 memiliki **pembandingan yang lebih terbatas karena sejak awal berada dalam orbit IWIP**. Isu utamanya lebih ke ketimpangan informasi internal desa (elite vs warga biasa).
- **Bias gender dalam distribusi bantuan** paling eksplisit didokumentasikan di Klaster 3 (bantuan perikanan mayoritas ke laki-laki meski nelayan perempuan aktif melaut).

Temuan-temuan di atas telah diakui secara resmi pada dokumen perencanaan yang relevan. Cetak Biru PPM Provinsi Maluku Utara 2025–2030 secara eksplisit menyimpulkan bahwa **“kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya PPM baik di masyarakat lingkaran tambang maupun perusahaan masih rendah”**, dan merekomendasikan pembentukan forum PPM karena “belum adanya koordinasi dan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dengan masyarakat”, konfirmasi resmi provinsi atas *accountability gap* yang menjadi temuan utama Klaster 3, menunjukkan bahwa persoalan ini bersifat sistemik di seluruh Maluku Utara, bukan spesifik Fidi Jaya.

Dokumen ini juga mengilustrasikan **akar kebingungan status ring Klaster 3**: Cetak Biru sendiri memuat dua definisi Ring yang tidak sepenuhnya konsisten: administratif-kualitatif pada bagian arah kebijakan (Ring 2 = desa dalam kecamatan yang sama namun tidak berbatasan langsung; Ring 3 = desa lain dalam kabupaten) versus kuantitatif berbasis jarak pada matriks program (Ring 1 = 0–5 km; Ring 2 = 5–10 km; Ring 3 = >10 km). Fidi Jaya (±25–30 km, namun satu Kecamatan Weda dengan tambang) akan masuk kategori berbeda tergantung definisi yang dipakai. **Ambiguitas ini bukan sekadar kesenjangan sosialisasi di tingkat desa, melainkan celah definisional yang belum terselesaikan dalam kerangka kebijakan resmi itu sendiri.**



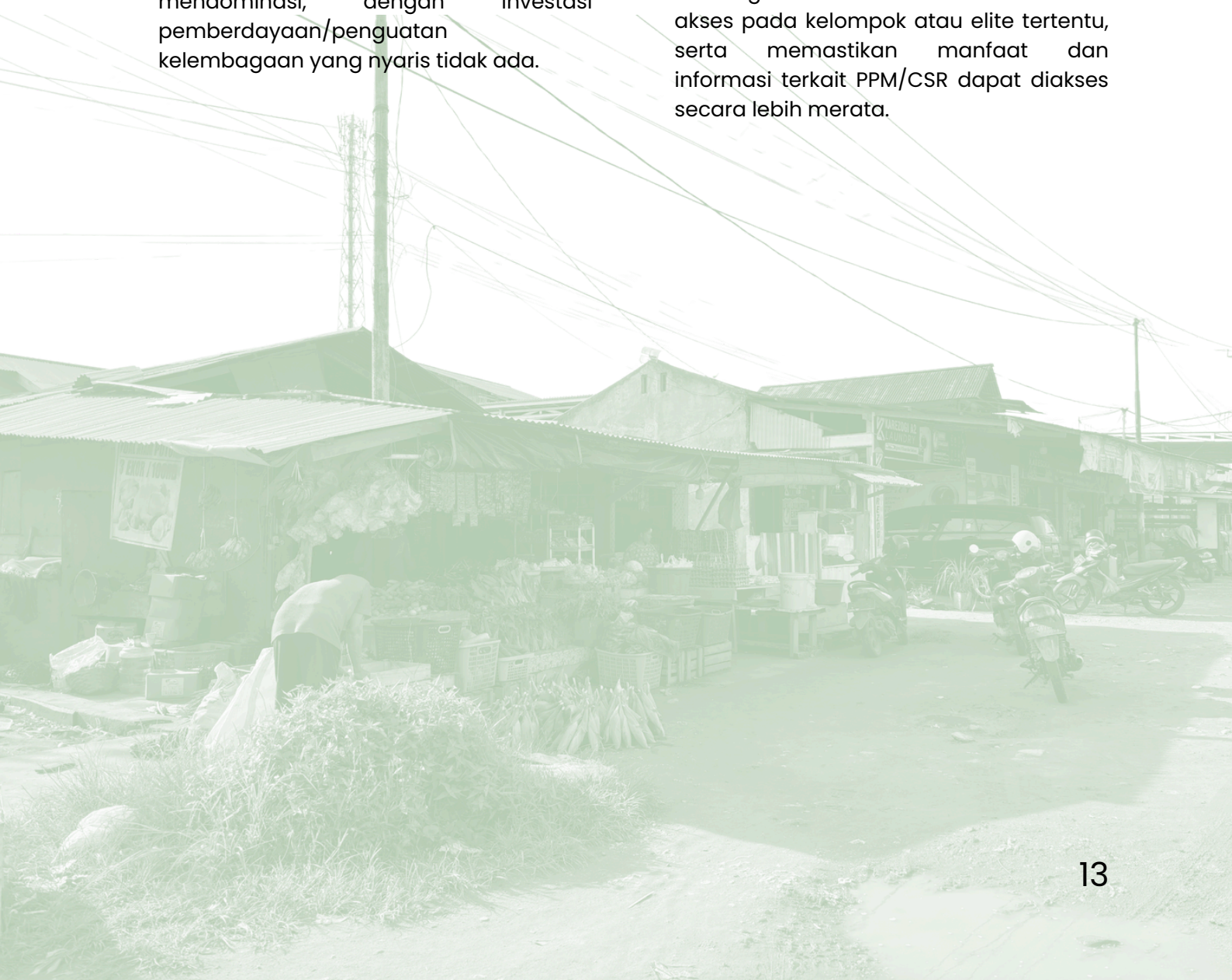
4.3.2 Tantangan dan Pembelajaran Lintas Kasus

Berdasarkan penjelasan mengenai kesamaan yang muncul di ketiga klaster, namun dengan sejarah dan posisi struktural yang berbeda sehingga memunculkan tantangan dalam efektivitas program PPM/CSR, yakni

- Tidak ada **sarana informasi dan komunikasi** yang transparan dan jelas mengenai PPM/CSR dan mekanisme distribusinya.
- Tidak ada **mekanisme evaluasi atau pengaduan** PPM/CSR yang dikenali dan dipercaya masyarakat di ketiga klaster.
- Ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan secara konsisten **membatasi ruang kritik** warga terhadap program yang berjalan.
- Model **bantuan karitatif jangka pendek** mendominasi, dengan investasi pemberdayaan/penguatan kelembagaan yang nyaris tidak ada.

Pembelajaran lintas kasus menegaskan bahwa efektivitas PPM/CSR ditentukan oleh **desain kelembagaan dan transparansi aturan main**, tidak hanya berdasar pada itikad baik perusahaan atau besarnya anggaran yang dikucurkan.

- **Edukasi warga soal perbedaan CSR (sukarela) dan PPM (kewajiban hukum)** sesungguhnya adalah kebutuhan yang berlaku untuk seluruh klaster, bukan hanya Klaster 3.
- Skema ring (Ring 1/2/3) sebagai basis distribusi PPM/CSR berpotensi menciptakan rasa **ketidakadilan yang kontraproduktif** terhadap kohesi sosial regional jika tidak didefinisikan dan dikomunikasikan dengan baik.
- **Platform informasi dan komunikasi yang transparan, inklusif, dan mudah diakses** warga diperlukan untuk mencegah sentralisasi informasi dan akses pada kelompok atau elite tertentu, serta memastikan manfaat dan informasi terkait PPM/CSR dapat diakses secara lebih merata.



4.4 Topik 4: Pemahaman dan Kesiapan Pascatambang

Bagaimana tingkat pemahaman dan kesiapan masyarakat serta pemerintah daerah terhadap fase pascatambang, termasuk aspirasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam merumuskan kebijakan pascatambang yang adil?

4.4.1 Kesamaan dan Perbedaan Antar Studi Kasus

Pola utama yang ditemukan di seluruh klaster adalah **ketidaksiapan kolektif menghadapi pascatambang yang konsisten di tingkat desa maupun individu**, ketiadaan forum formal yang membahas transisi pascatambang, dan strategi adaptasi yang bersifat individual dan fragmentaris alih-alih perencanaan kolektif desa. Ketiga klaster juga sama-sama menunjukkan pola respons yang terbelah berdasarkan posisi ekonomi: kelompok yang diuntungkan *boom* (pemilik usaha, pekerja tambang) justru paling khawatir menghadapi pascatambang, sementara kelompok yang tetap memiliki akses sumber daya alam memandang pascatambang dengan lebih tenang atau bahkan melihatnya sebagai peluang pemulihan lingkungan.

Namun, perbedaan yang paling mencolok adalah **tingkat kesadaran risiko berbanding terbalik dengan kedekatan fisik terhadap tambang**. Klaster 3 (secara fisik paling jauh dari tambang) justru menunjukkan kesadaran risiko pascatambang yang paling tinggi dan paling eksplisit, hampir seluruh responden menyatakan "siapa tidak siap, harus siap", dan memori kolektif Pulau Gebe disebut sangat konkret dan berulang. Klaster 2 juga merujuk Gebe namun dengan intensitas lebih rendah, sedangkan Klaster 1 relatif paling sedikit merujuk preseden konkret, bayangan pascatambang di sana lebih abstrak dan terpolarisasi. Sehingga, absensi dari dokumentasi preseden Pulau Gebe yang

belum diformalkan mengakibatkan sikap reflektif dari masyarakat dan pemerintah masih belum berimbang dalam menanggapi dan menyiapkan diri untuk pascatambang.

Perbedaan kedua terletak pada **mekanisme "lock-in" yang mendasari kerentanan**. Klaster 2 memiliki kerangka paling eksplisit: *lock-in* aset (lahan sudah terjual habis) berpadu dengan *lock-in* keterampilan menciptakan *silent lock-in*. Klaster 1 menunjukkan pola serupa namun kurang tajam. Klaster 3 menunjukkan pola berbeda: sebagian kelompok (PNS, pemilik usaha) memiliki dukungan struktural lebih besar, sehingga kerentanan lebih terkonsentrasi pada kelompok spesifik.

Kontras dengan sinyal kebijakan pemerintah. Refleksi Kadis Disnakertrans memberi gambaran penting terhadap kesamaan "ketidaksiapan kolektif" di atas: Disnakertrans menyatakan bahwa Halmahera Tengah "sudah memasuki fase pascatambang kecil". Pascatambang ini bahkan sudah dirasakan bukan karena tambang tutup, melainkan karena kebijakan pengurangan kuota ekspor yang menyebabkan lebih dari 1.000 perusahaan hilirisasi mengalami pengurangan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal ini memicu merumahkan sementara pekerja lokal maupun non-lokal. Disnakertrans menilai sektor industri hilirisasi belum terdampak langsung, namun memproyeksikan efek rembetan (*ripple effect*) karena rantai pasok sektor lain pada akhirnya bergantung pada sektor pertambangan. Ini adalah kesenjangan yang penting untuk dicatat: sementara warga ketiga klaster umumnya masih memandang pascatambang sebagai skenario jauh dan abstrak, gejala awal transisi ternyata sudah bergerak nyata saat ini.

Institusionalisasi dari pascatambang menjadi salah satu isu utama dalam kesiapan masyarakat dan pemerintah menghadapi fase ini. Dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah 2025–2029 (Bagian 6.2) sama sekali tidak menyebut kata “pascatambang” di seluruh dokumennya. Selain itu, ketiadaan skema pembiayaan pemulihan lingkungan pascatambang menjadi salah satu isu dalam dimensi keadilan restoratif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup bahwa, tidak seperti pendidikan dan kesehatan yang sudah memiliki alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang jelas, pemulihan lingkungan pascatambang belum memiliki skema pembiayaan setara padahal biayanya diproyeksikan sangat besar dan tidak dapat mengembalikan kondisi seperti semula.

3.4.2 Tantangan dan Pembelajaran Lintas Kasus

Tantangan yang direproduksi dalam topik kesiapan dan pemahaman masyarakat terkait pascatambang, sebagai berikut:

- **Absennya forum formal pembahasan transisi pascatambang** di ketiga klaster, sehingga strategi adaptasi bersifat individual dan tidak saling memperkuat antarwarga.
- **Absennya insentif politik-ekonomi** untuk merencanakan pascatambang selagi tambang masih menguntungkan (staple trap).
- **Kesadaran risiko yang tinggi** (seperti di Klaster 3) tidak serta-merta berubah menjadi kesiapan konkret.

- **Validasi paling tegas atas ketidaksiapan struktural:** penelusuran atas RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah 2025–2029 menemukan bahwa istilah “pascatambang” tidak disebut sama sekali di seluruh 326 halaman dokumen, dan istilah “PPM” maupun “CSR” juga sama sekali tidak muncul; kata “IWIP” sendiri hanya disebut dua kali. Ini adalah bukti paling konkret bahwa ketidaksiapan pascatambang bukan sekadar persepsi warga, melainkan kekosongan nyata dalam dokumen perencanaan resmi tertinggi kabupaten, padahal lebih dari 60% pertumbuhan ekonomi kabupaten ini berasal dari sektor tambang dan industri pengolahan terkait (Bagian 3.1).

Pembelajaran lintas kasus menunjukkan bahwa kesiapan pascatambang tidak bisa dibangun secara reaktif atau seragam, melainkan membutuhkan pemanfaatan preseden yang sudah ada, jangkauan komunikasi risiko yang lebih luas, dan momentum kebijakan yang dimanfaatkan sebelum tertutup.

- **Preseden Pulau Gebe adalah aset pembelajaran yang belum dimanfaatkan** secara sistematis oleh pemerintah daerah (*collective memory* belum diterjemahkan ke dalam *collective action*).
- **Karena kesadaran risiko tidak berbanding lurus dengan jarak fisik dari tambang**, strategi komunikasi risiko pascatambang tidak bisa hanya menyasar wilayah yang secara administratif “dekat” dengan tambang.
- **Karena mekanisme *lock-in* berbeda-beda**, kebijakan pascatambang perlu membedakan pendekatan per klaster.
- **Kekosongan istilah “pascatambang”/“PPM”/“CSR” dalam RPJMD** menunjukkan bahwa momentum penyusunan RPJMD periode berikutnya (setelah 2029) adalah jendela kebijakan konkret dan penting yang perlu dimanfaatkan.



5. Penutup

Sintesis lintas kasus ini menunjukkan bahwa ketiga klaster, meskipun berbeda secara fisik, ekonomi, dan sosial, mengalami pola keadilan yang secara struktural identik: manfaat ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara beban lingkungan, sosial, dan risiko pascatambang jatuh pada kelompok yang paling tidak memiliki kapasitas untuk menanggungnya. Perbedaan yang muncul antar klaster pada tiap RQ bukan perbedaan arah pola, melainkan perbedaan mekanisme dan intensitas yang membentuknya.

Refleksi dinas dan dua dokumen kebijakan resmi (Cetak Biru PPM Provinsi dan RPJMD Kabupaten) memperkuat sebagian besar temuan ini dari sisi data dan perencanaan resmi pemerintah, sekaligus menghadirkan sudut pandang yang secara jujur berbeda pada beberapa isu, terutama soal kausalitas kelangkaan ikan dan makna Pulau Gebe sebagai preseden pascatambang. Perbedaan ini sengaja dipertahankan apa adanya dalam laporan, karena keduanya mencerminkan realitas yang dialami dari posisi struktural yang berbeda. Temuan paling mendesak dari triangulasi ini adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan kabupaten yang paling mengikat sekalipun, RPJMD 2025–2029, belum memiliki narasi untuk mendorong kesiapan pascatambang menegaskan bahwa jendela kebijakan untuk mengisi kekosongan ini masih terbuka dan penting untuk dimanfaatkan.

Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan transisi berkeadilan di Halmahera Tengah tidak dapat didekati secara seragam untuk seluruh wilayah lingkaran tambang, namun juga tidak dapat didekati secara terisolasi per desa. Yang dibutuhkan adalah kerangka kebijakan kabupaten yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi perbedaan mekanisme lokal, namun cukup tegas untuk menjamin standar minimum keadilan distributif, prosedural, rekognisi, dan restoratif di seluruh wilayah terdampak.

Disamping itu, sepanjang proses penelitian ini diselenggarakan, dapat dipelajari bahwa **temuan sosial-ekonomi-lingkungan saling berkelindan,** sehingga upaya penyelesaian perlu pendekatan lintas sektor, berbasis konteks, antisipatif, partisipatif, dan berorientasi pada transisi jangka panjang.



dala
institute
for environment & society

